

**STRATEGI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN:  
Strategi-strategi Peningkatan Lapangan Kerja, Peluang Kerja, dan  
Produktivitas**

**Drs. Jufrianto Sibarani, M.Pd.**

**Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Subang**

**Email: jufriantosibarani@gmail.com**

**ABSTRAK**

Pendidikan berkelanjutan/berkesinambungan (*recurrent education*) adalah suatu strategi yang komprehensif dalam pendistribusian biaya pendidikan dan latihan sepanjang hayat individu peserta didik secara berulang melalui pemanfaatan waktu-senggang (*leisure*) - akan menjadi suatu sarana penting untuk mengangkat masalah-masalah yang berkaitan dengan lapangan kerja (*employment*), mobilitas sosial, dan produktivitas. Analisisnya didasarkan pada metode-metode pendanaan pendidikan berkelanjutan yang efisien, adil/merata (*equitable*), fleksibel, dan komprehensif. Topik-topik yang menjadi fokus analisis tersebut menggambarkan suatu variasi ide dan pengalaman di negara-negara industri untuk menampilkan alternatif-alternatif pembentukan suatu kerangka pembiayaan pendidikan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Financing recurrent education, employment, job opportunity, productivity*

**A. PENDAHULUAN**

Ide yang mendasari tulisan ini berasal dari konferensi tentang biaya dan pendanaan (*costs and financing*) pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan pada Lembaga Penelitian Pembiayaan Pendidikan dan Pemerintah - *Institute for Research on Educational Finance and Government* (IFG), Stanford University. Konferensi tersebut disponsori oleh Pusat Penelitian dan Inovasi Pendidikan (CERI) dari Organisasi Kerjasama Ekonomi untuk Pembangunan (OECD) yang berkedudukan di Paris. Keduanya, IFG dan OECD, telah berupaya menyediakan banyak sekali sumber bagi pengkajian pendekatan-pendekatan baru untuk pembiayaan atau pendanaan pada umumnya pendidikan tinggi dan khususnya pendidikan berkelanjutan.

Kajian tentang struktur konten *financing recurrent Education*, Levin dan Schutze (1983) mengangkat isu yang berkaitan dengan dimensi-dimensi ekonomi dan politik pendidikan berkelanjutan. Hasil analisis buku disajikan dalam tiga bagian.

Pertama, model-model komprehensif pembiayaan pendidikan berkelanjutan, kedua, memaparkan pembiayaan pendidikan berkelanjutan di Amerika Serikat, dan ketiga, mengkaji pembiayaan pembayaran pendidikan yang tertunda (*financing paid educational leave*).

Model-model Komprehensif Pembiayaan Pendidikan Berkelanjutan terdiri atas model-model yang diberi nama secara individual (*individual entitlements*), hak-hak pemberian nama model individual (*individual drawing rights*), kerangka pendanaan intermediate (*“parafiscal”*), dan mekanisme pendanaan: dampaknya pada pendidikan pascawajib-belajar (*postcompulsory education*). Pembiayaan pendidikan berkelanjutan di AS dengan topik berturut-turut sbb: inventory program dan sumber dukungan, program yang disponsori pengusaha (*employer*), unions dan pendidikan pascapendidikan menengah (*postsecondary education*), dampak ukuran pembatasan pajak di California, dan peluang yang tertunda: belajar sepanjang hayat di AS.

## **B. KAJIAN TEORI**

Kajian mengenai dimensi-dimensi ekonomi dan politik pendidikan berkelanjutan, Levin dan Scutze pada awal tahun 1980-an telah memprediksi bahwa pada tahun-tahun terakhir abad ke-20, negara-negara industri di dunia menghadapi tantangan besar dalam sektor pendidikan dan training seiring dengan pertumbuhan tenaga kerja dan percepatan perubahan teknologi. Dalam masa tersebut terjadi transformasi industri dan lapangan kerja yang pesat akibat terjadinya perubahan-perubahan ekonomi antarnegara serta pengenalan dan aplikasi teknologi-teknologi baru yang menciptakan perubahan yang pesat dalam lingkungan pekerjaan (*workplace*). Pada saat yang sama, pertumbuhan tenaga kerja dan khususnya yang memasuki tenaga kerja baru berpendidikan mengalami penurunan hingga pada level yang tidak terduga sebelumnya. Dalam kaitan itu, mereka yang baru memasuki pasar tenaga kerja terlatih (*newly trained labor market*) tidak dapat diandalkan untuk mempertahankan perubahan-perubahan yang dihadapi seterusnya. Tanpa mempermasalahkan AS, Eropa Barat dan negara-negara industri lainnya terus mengupayakan strategi-strategi baru dalam pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan tenaga-tenaga kerja yang sudah ada dalam rangka memenuhi tuntutan-tuntutan pekerjaan baru. Dalam konteks ini, Levin dan Schutze mengungkapkan metode-metode dan isu-isu pembiayaan suatu sistem pendidikan aberkelanjutan yang dapat mengakomodasikan pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan definisi secara luas, pendidikan berkelanjutan (*recurrent education*) didefinisikan sebagai suatu strategi pendidikan komprehensif bagi siapa saja yang telah mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pascawajib-belajar atau pascapendidikan dasar. Definisi pendidikan

berkelanjutan yang dikutip Levin dan Schutze (1983: 9) dari OECD (1973: 24) adalah sebagai berikut:

..., recurrent education can be defined as a comprehensive education strategy for all post-compulsory or post-basic education, the essential characteristic of which is the distribution of education over the total life span of the individual in a recurring way, i.e. the alternation with other activities such as work, but also with leisure and retirement (OECD, 1973: 24 dalam Levin & Schutze, 1983: 9).

Sesuai dengan kutipan di atas, meskipun didasarkan pada definisi yang paling luas, pendidikan berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai strategi pendidikan komprehensif bagi seluruh pendidikan pasca-pendidikan-wajib belajar dan pasca-pendidikan dasar, sebagai karakteristik yang esensial dari distribusi pendidikan sepanjang hayat individu secara berkesinambungan, yakni sebagai pengganti kegiatan-kegiatan lain seperti pekerjaan termasuk pemanfaatan waktu senggang dan masa pensiun. Definisi pendidikan berkelanjutan ini memiliki dua elemen yang esensial. Pertama, pendidikan tersebut menawarkan suatu alternatif strategi pendidikan bagi konsentrasi (pendidikan) konvensional dari seluruh pendidikan formal dan full-time bagi remaja. Kedua, pendidikan tersebut mengusulkan suatu kerangka dimana belajar sepanjang hayat akan diorganisasikan, dan ini masih merupakan pengganti dan merupakan interaksi yang efektif antara pendidikan (sebagai suatu situasi belajar struktural) dan aktivitas sosial lainnya selama belajar berlangsung. Selain itu, dapat dikemukakan bahwa definisi pendidikan berkelanjutan yang bersifat umum ini juga memiliki dua karakteristik, yakni, menunjuk pada penawaran pendidikan yang fleksibel dalam struktur dan konten, dan juga menunjuk pada pengalaman-pengalaman pendidikan yang tersedia sepanjang hayat individu.

Sistem pendidikan berkelanjutan dengan sendirinya akan menggantikan pola tradisional melalui penyediaan peluang-peluang untuk memperoleh pendidikan dan latihan sepanjang hayat. Dalam konteks ini individu-individu akan memanfaatkan periode-periode kerja dan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi baik kebutuhan-kebutuhan personalnya maupun kebutuhan-kebutuhan majikan (perusahaan) tempatnya bekerja. Sistem alternatif kesempatan pendidikan dan pelatihan tersebut yang akan dikonstruksi adalah yang memadukan program-program yang sudah ada seperti program magang, extension, on-the-job training, program studi pada jenjang pendidikan tinggi, program-program korespondensi dan sekolah-sekolah teknik, dan juga penawaran dan pendekatan-pendekatan baru untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Pengalaman-pengalaman pendidikan semacam ini hendaknya disediakan baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja dan juga melalui tayangan televisi pendidikan serta pembelajaran dengan menggunakan bantuan-komputer.

Penyediaan kesempatan-kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan tersebut mesti fleksibel, misalnya pada akhir pekan dan malam hari serta selama jam kerja reguler. Singkatnya, dapat ditegaskan bahwa suatu pendekatan pendidikan berkelanjutan melampaui pendekatan pendidikan reguler yang sudah ada, yakni suatu pendekatan sistematis tanpa memandang masalah-masalah seperti keuangan atau pendanaan, informasi, koordinasi, penyelenggaraan pendidikan bagi kaum buruh, dan sertifikasi pengalaman-pengalaman training. Menurut Levin & Schutze (1983: 11), penekanan utama pendekatan pendidikan tersebut diberikan pada suatu sistem peluang yang bersifat menyeluruh bagi individu-individu, kelompok-kelompok kecil, dan para pengusaha dalam menciptakan suatu menu penawaran kesempatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan mereka.

Sesuai dengan pemikiran-pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, paling sedikit ada empat aspek yang penting dicermati dalam kaitannya dengan pendidikan berkelanjutan (Levin & Schutze, 1983: 11-35), yaitu: (1) konstruk suatu sistem pendidikan berkelanjutan, (2) tantangan-tantangan politik dan ekonomi, (3) pendidikan berkelanjutan sebagai suatu bintang yang baru muncul (*recurrent education as a rising star*), dan (4) pembiayaan pendidikan berkelanjutan.

Analisis terhadap konstruk sistem pendidikan berkelanjutan didasarkan pada pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi produktif, menurunkan lapangan kerja, menurunkan pendidikan yang berlebihan (*overeducation*) dan pengangguran (*underemployment*), partisipasi tenaga kerja (buruh), meningkatkan mutu pemanfaatan waktu senggang (*improving quality of leisure*), mengurangi pemborosan, meningkatkan partisipasi sosial, mencari bentuk lembaga-lembaga pendidikan yang lebih sesuai untuk pendidikan berkelanjutan, dan membubarkan sistem sekolah pascawajib-belajar (*deschooling the postcompulsory system*). Semuanya ini merupakan motif-motif yang mendasari pengakuan terhadap perluasan sistematis pendidikan berkelanjutan, semuanya ada sembilan motif. Setiap motif yang mendasari versi pendidikan berkelanjutan tersebut memiliki rasional, sasaran peserta utama, dan bentuk-bentuk pendidikan dan/atau pelatihan yang pokok.

Tanpa mengabaikan tantangan-tantangan politik dan ekonomi (misalnya, sosialisasi pendekatan) dalam penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan, analisis terhadap pembiayaan pendidikan berkelanjutan) difokuskan pada model-model komprehensif pembiayaan pendidikan berkelanjutan, pembiayaan pendidikan berkelanjutan di AS, dan pembiayaan bayaran pendidikan yang tertunda.

### C. PEMBAHASAN

Analisis terhadap pembiayaan pendidikan hendaknya dikaitkan dengan pemahaman tentang pembiayaan pendidikan formal, pembiayaan pendidikan nonformal, dan pembiayaan pendidikan berkelanjutan. Dengan demikian, selain diperoleh pemahaman khususnya mengenai perbandingan pembiayaan untuk sistem-sistem pendidikan tersebut, dapat juga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pembiayaan pendidikan berkelanjutan yang berlangsung sepanjang hayat. Namun, dalam konteks ini penting dicermati pengertian pendidikan berkelanjutan. Sesuai definisi yang disajikan dalam bagian pendahuluan laporan ini, pendidikan berkelanjutan adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi mereka yang telah menyelesaikan pendidikan dasar dan pendidikan pascawajib-belajar (dalam konteks AS, sampai SLTA) dan telah memasuki angkatan kerja, baik dengan cara memanfaatkan waktu luang untuk meningkatkan skill kerja dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tertentu maupun dengan cara mengikuti pelatihan dalam masa tua (pensiun), dan pendidikan ini berlangsung sepanjang hayat.

Banyak aspek yang penting dicermati dalam pembiayaan pendidikan berkelanjutan tersebut, dan tentu saja sangat berbeda dengan pembiayaan pendidikan formal dan nonformal. Sebagaimana telah disinggung dalam bagian pendahuluan laporan ini, ada sembilan motif yang mendasari pendidikan berkelanjutan, dan masing-masing motif memiliki rasional, clientele, dan bentuk-bentuk pendidikan/pelatihan tersendiri. Motif-motif tersebut dapat juga dijadikan sebagai dasar analisis pembiayaan setiap bentuk pendidikan berkelanjutan yang dimaksud. Namun, sebagai perbandingan agaknya dalam hal ini perlu dikaji tentang pembiayaan dalam sistem pendidikan formal, dan khususnya lagi dalam kasus pembiayaan pendidikan formal di Indonesia.

Ziderman dan Douglas (1995) mengangkat isu tentang pembiayaan pendidikan tinggi khususnya di negara-negara berkembang. Salah satu masalah penting yang dianalisis adalah: Apakah mensubsidi lembaga pendidikan tinggi (PT) atau mensubsidi mahasiswa? Respon terhadap pertanyaan ini dapat dikaitkan dengan fenomena yang universal, di mana dukungan pemerintah pada lembaga PT menjadi efektif melalui transfer langsung ke lembaga-lembaga PT, atau melalui suatu lembaga intermediasi yang berfungsi sebagai penjamin (*intermediary grants institutions*) transfer tersebut. Dalam konteks ini, yang penting dicermati adalah bahwa efektivitas mekanisme transfer sangat berbeda antara satu negara sedang berkembang dengan negara-negara sedang berkembang lainnya. Dalam kaitannya dengan isu yang diangkat Levin dan Schutze (1983), dapat dikemukakan bahwa perlu memperluas sasaran pengalokasian anggaran untuk pembiayaan pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan lembaga pendidikan tinggi. Dengan kata lain, anggaran yang disediakan/disalurkan tidak hanya diperuntukkan

bagi pembiayaan penyelenggaraan program-program akademik yang rutin tetapi juga untuk penyelenggaraan program-program pendidikan berkelanjutan.

Mekanisme alokasi dana secara langsung dari pemerintah untuk lembaga-lembaga PT sekarang ini diaplikasikan dengan pola-pola yang sangat berbeda antara satu negara dengan negara-negara lainnya. Suatu pertanyaan penting dalam hal ini adalah, apa rasional yang menyepelekan atau memandang rendah pada mekanisme ini? Alokasi pendanaan pokok dari pemerintah untuk lembaga PT, dalam prakteknya dapat dilihat didasarkan pada salah satu dari tiga kriteria umum atau kombinasinya. Pertama, berdasarkan pemikiran pembayaran dari hasil/pendapatan (*payment by results*); kedua, sistem alokasi pendanaan difokuskan pada *output* sistem pendidikan tinggi; dan ketiga, *rewarding institutions* berdasarkan kinerjanya menghasilkan lulusan termasuk lulusan PPs serta penelitian lembaga tersebut.

Pendekatan semacam ini secara khusus relevan untuk sistem-sistem PT yang tidak efisien, di mana banyak mahasiswanya yang *dropout* dan mengulang, serta didukung oleh kriteria seleksi yang rendah terhadap efektivitas dan efisiensi lembaga PT yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diupayakan pendanaan dari pihak luar (*output funding*) untuk mendukung kuantitas *output* (lulusan) yang belum tercapai, namun tanpa mengabaikan sama sekali aspek kualitasnya.

#### **D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berbeda dengan pendekatan kinerja seperti yang diuraikan di atas, pendanaan dapat dialokasikan bagi lembaga-lembaga PT sesuai dengan biaya pendidikan tinggi. Metode ini pada umumnya dikenal dengan istilah '*input method*'. Metode yang paling populer adalah dengan menggunakan rumus-rumus, biasanya yang didasarkan hasil kali 'enrollments' berdasarkan parameter-parameter *unit cost (unit resource)*. Namun, sistem semacam ini, jika tidak dirancang secara cermat, bisa saja tidak berhasil memberikan insentif yang benar bagi lembaga PT untuk bekerja secara efisien (misalnya, menghindarkan penurunan standar mutu masukan).

Pemerintah pada umumnya menggunakan mekanisme-mekanisme transfer dengan mengabaikan kriteria yang berhubungan dengan kinerja internal lembaga PT (*input* dan *output*). Mekanisme ini tidak menggunakan kriteria objektif internal seperti perolehan dana berdasarkan negosiasi (*negotiated funding*). Pola ini dipandang lebih sesuai dengan tuntutan otonomi lembaga pendidikan tinggi, khususnya dalam pengelolaan dana. Jika dikaitkan dengan isu pendanaan pendidikan berkelanjutan, berarti pihak lembaga PT dituntut memperluas program-programnya yang bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja, kesempatan kerja, dan produktivitas.

Konsekuensinya, diperlukan kebijakan yang kondusif untuk pembiayaan pendidikan berkelanjutan tersebut.

Bray dan Thomas dalam *Financing Education in Indonesia* (1998: 98-107) menganalisis tentang pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam bagian pertama analisisnya dikemukakan tentang karakteristik lembaga-lembaga PT di Indonesia. Analisis selanjutnya berturut-turut difokuskan pada sumber-sumber dana untuk pembiayaan PT, sumber dana untuk pendidikan tinggi negeri (PTN), dan perbelanjaan PTN. Namun, dalam buku ini tidak disinggung tentang pembiayaan pendidikan berkelanjutan, melainkan pembiayaan berkelanjutan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi. Karena itu, tantangan dalam pengembangan PT di Indonesia adalah strategi-strategi apa yang dibutuhkan untuk pembiayaan pendidikan berkelanjutan melalui peningkatan lapangan kerja, kesempatan atau peluang kerja dan produktivitas.

Karakteristik PT di Indonesia dikategorikan menjadi PTN, PTS, Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri (*Public Mdrasah*), dan Pendidikan Tinggi Agama Islam Swasta (*Private Madrasah*). Tanpa mengabaikan jumlah PT di Indonesia, secara umum dapat dinyatakan bahwa sumber-sumber pendanaannya berasal dari pemerintah melalui pengalokasian dana-berulang/berkelanjutan (*recurrent financial*) dan dana pembangunan (*developmental financial*); dan yang bersumber dari dalam-lembaga (*within-institution*) sendiri melalui penarikan iuran (SPP) dan sumbangan-sumbangan lain yang syah sebagai pendapatan tambahan lembaga PT yang bersangkutan.

Khususnya untuk lembasga-lembaga PTN, sumber-sumber dananya adalah dari anggaran berkelanjutan, anggaran pembangunan, penarikan iuran (SPP mahasiswa), dan usaha-usaha lain yang dilakukan sendiri oleh lembaga PTN. Perbelanjaannya ditujukan terutama untuk pembayaran gaji/honor yang berulang, investasi pembangunan sarana dan prasarana lembaga, pembelian buku-buku, pengembangan staf, dan pendanaan proyek-proyek khusus sesuai dengan kepentingan lembaga PT.

#### DAFTAR PUSTAKA

Bowen, Howard R. (1980). *The Cost of Higher Education: How Much Do Colleges and Universities Spend per Student and How Much Should They Spend?* San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Bray, Mark & Thomas, R. Murray. (1998). *Financing Education in Indonesia*. Hong Kong: ADB, Comparative Education Research Centre The University of Hong Kong.

Levin, Henry M. & Schutze, Hans G. (Eds.). (1983). *Financing Recurrent Education: Strategies for Increasing Employment, Job Opportunities, and Productivity*. Beverly Hills/London: Sage Publications.

Ziderman, Adrian & Albrech, Douglas. (1995). *Financing Universities in Developing Countries*. Washington, D. C. & London: The Falmer Press.